

BAB II

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI TAHTA SUCI VATIKAN DAN
KETERLIBATAN DALAM KONFLIK SURIAH**

Pada bagian ini membahas mengenai sistem pemerintahan Tahta Suci Vatikan dan kebijakan luar negerinya. Hal ini menyangkut mengenai bentuk pemerintahan Tahta Suci Vatikan serta sistem mengenai pengambilan kebijakan luar negerinya dan beberapa bentuk nyata dari kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan itu sendiri. Pengambilan kebijakan luar negeri ini juga mencakup tujuan yang ingin dicapai oleh Tahta Suci Vatikan yang dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya doktrin atau ajaran sosial Gereja yang dianut. Dari berbagai jenis ajaran sosial ini akan berfokus kepada *Pacem In Terris* atau salah satu ajaran sosial Gereja Katolik yang dikeluarkan oleh Paus Yohannes XXIII yang mencerminkan tujuan dari Tahta Suci Vatikan dalam lingkup yang lebih luas yakni mencapai perdamaian. Selanjutnya bab ini juga membahas mengenai bagaimana konflik Suriah itu sendiri terutama berbagai kekerasan yang terjadi sebagai imbas dari konflik itu sendiri yang sangat bertentangan akan nilai yang dianut oleh Tahta Suci Vatikan. Adanya berbagai kekerasan yang terjadi dan sangat bertentangan akan nilai yang dianut oleh Tahta Suci Vatikan kemudian mendorong bagian dari tulisan ini yang kemudian membahas mengenai apa saja keterlibatan Tahta Suci Vatikan di dalam konflik tersebut.

2.1 Tahta Suci Vatikan sebagai Aktor dalam Hubungan Internasional

Tahta Suci Vatikan merupakan salah satu subjek hukum internasional yang lahir dari Perjanjian Lateran pada 11 Februari 1929 sebagai negara kota yang dipimpin oleh sri paus dengan sistem monarki absolut. Secara prakteknya, Tahta Suci Vatikan memiliki posisi yang sama sebagai negara dan juga dipandang sebagai lembaga di bawah hukum internasional yang memiliki kepribadian hukum yang menyebabkan Tahta Suci Vatikan dapat membuat perjanjian dengan negara dan juga dapat mengirimkan dan menerima perwakilan diplomatik yang biasa dipanggil dengan nunsiat apostolik. Posisi Tahta Suci Vatikan sendiri memiliki posisi sebagai “*permanent observer*” di PBB dan bukan sebagai anggota penuh. Hal ini didasarkan pada keinginan Tahta Suci Vatikan untuk mempertahankan netralitas mutlak dalam permasalahan politik tertentu (Permanent Observer Mission of The Holy See to The United Nations, t.thn).

Adanya Perjanjian Lateran sebagai bentuk kesepakatan antara Italia diwakili oleh Benito Mussolini dan Tahta Suci Vatikan oleh Kardinal Gasparri. Melalui perjanjian ini, Italia mengakui kedaulatan Tahta Suci Vatikan dan menyerahkan wilayah dengan luas sekitar 44 ha di Roma sebagai wilayah kekuasaan Tahta Suci Vatikan. Melalui Perjanjian Lateran ini, Italia juga mengakui hak perwakilan aktif dan pasif dari Tahta Suci Vatikan menurut aturan hukum internasional, yang kemudian membuat Tahta Suci Vatikan dapat untuk terlibat dalam hubungan internasional seperti membuka hubungan dengan negara lainnya. dan memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara serta terlibat dalam berbagai organisasi internasional (The Holy See, t.thn)

Dalam hukum internasional, terdapat dua entitas mengenai Tahta Suci Vatikan yang berbeda, yakni Vatikan dan Tahta Suci. Perlu dibedakan bahwa Vatikan merupakan entitas geografis atau sering disebut dengan Kota Vatikan sebagai wilayah kedaulatan tempat paus melaksanakan kegiatannya, yang menyediakan basis fisik dan lokasi administrasi, sedangkan Tahta Suci merupakan entitas atau aktor yang bertindak dalam hubungan internasional, seperti mengadakan perjanjian, dan keduanya sama sama dikepalai oleh seorang paus.

2.2 Kebijakan Luar Negeri Tahta Suci Vatikan

Secara umum, paus diakui sebagai kepala negara dan memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif penuh. Namun dalam pelaksanaannya, paus akan mendelegasikan kekuasaan dan otoritasnya kepada berbagai badan atau organ. **Secara legislative**, paus akan mendelegasikan otoritasnya kepada Komisi Kepausan untuk Negara Kota Vatikan yang terdiri dari beberapa kardinal yang dipilih oleh paus. **Secara eksekutif** didelegasikan kepada Presiden Komisi Kepausan yang juga menjabat sebagai Presiden Kegubernuran Kota Vatikan, dan **secara yudisial** didelegasikan kepada Mahkamah Agung Signatura Apostolik. Paus kemudian menjalankan kekuasaannya dibantu oleh Roman Kuria, yakni kelompok administrasi Tahta Suci Vatikan dan badan pemerintah pusat dari seluruh Gereja Katolik dari berbagai biro Vatikan yang terdiri dari kongregasi, tribunal, dewan kepausan, sinode para uskup, komisi kepausan, dan lainnya yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Negara (Secretary Of State) (The Holy See Press Office, 2018).

Tahta Suci Vatikan bukan hanya mewakili keagamaan, namun juga mewakili anggota masyarakat negara-negara yang berhak memberikan pelayanan yang baik secara universal, baik umatnya atau bukan. Sebagai salah satu aktor internasional, Tahta Suci Vatikan sebagai badan politik dan juga pusat Gereja Katolik Roma turut berperan dalam panggung internasional untuk mencapai kepentingannya. Namun, terminologi kepentingan disini tidaklah sama seperti kepentingan negara lainnya yang biasanya berputar pada kepentingan ekonomi, militer atau politik. Adapun tujuan kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan direpresentasikan ke dalam dua tujuan, yakni *possession and milieu* atau tujuan kepemilikan dan lingkungan. Kepemilikan ini bertujuan untuk meningkatkan, melestarikan atau mengontrol yang dimiliki oleh aktor. Hal ini berkaitan dengan perlindungan kepada jemaat atau umat Katolik yang dipimpin oleh paus dan juga nilai-nilai yang dimiliki oleh Tahta Suci Vatikan. Secara *milieu* atau lingkungan, Tahta Suci Vatikan bertujuan untuk membentuk atau mempengaruhi kondisi lingkungan di luar batas alami aktor (misalnya teritorial), dan kebanyakan tujuan Tahta Suci adalah lingkungan, karena berkaitan dengan dasar ajaran agama sebagai misi penyelamatan universal (Troy, 2016). Tujuan ini dapat diartikan sebagai tujuan Tahta Suci Vatikan yang berfokus pada perdamaian dan kemanusiaan (hal mengenai kebaikan bersama dan kesejahteraan umum semua orang, hak asasi manusia).

Dalam kebijakan luar negerinya, Tahta Suci Vatikan memiliki beberapa tujuan, seperti penghormatan terhadap martabat manusia (hak asasi manusia), kebebasan beragama, solidaritas, kesejahteraan umum, dan perdamaian. Semua

aspek tersebut diyakini saling mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk kesejahteraan yang universal. Tahta Suci Vatikan melihat bahwa penghormatan terhadap martabat manusia termasuk menghormati hak asasi manusia yang dimiliki semua orang tanpa terkecuali terlepas dari status yang dimiliki. Secara kristologis, Tahta Suci Vatikan memandang manusia merupakan gambaran dari sang pencipta dan melalui *Compendium* menekankan bahwa hak asasi merupakan hal yang tak tertandingi dan tidak dapat dicabut. Demikian halnya dengan kebebasan beragama, dimana Tahta Suci Vatikan memiliki dua tujuan yakni mempromosikan kebebasan individu dalam beragama dan kebebasan komunitas (khususnya pada umat Katolik). Tujuan ini terlihat dari usaha Tahta Suci Vatikan di beberapa negara, khususnya di China dan Arab Saudi yang berusaha untuk memperjuangkan kebebasan beragama, terutama pada kaum minoritas (Shelledy, 2004)

Tahta Suci Vatikan sendiri memiliki misi kemanusiaan global yang percaya bahwa Gereja dapat berkontribusi untuk menjadikan keluarga manusia dan sejarahnya lebih manusiawi. Tahta Suci Vatikan memandang kehidupan internasional melalui kacamata misi spiritualnya dengan mengutamakan kesetaraan martabat dan kesejahteraan semua umat manusia termasuk perdamaian, kebebasan beragama, dan pembangunan integral. Tahta Suci berfokus dan bekerja pada perdamaian dalam jangka panjang (Permanent Observer Mission of the Holy See to the United Nations), dimana Tahta Suci Vatikan memandang bahwa perdamaian antara, dan untuk semua bangsa menjadi salah satu tujuan utama kegiatan internasional Tahta Suci, karena tanpa

perdamaian, perkembangan manusia yang utuh tidak mungkin terjadi. Seruan akan perdamaian ini terlihat nyata ketika terjadinya perang dunia dimana Paus Pius XII menyerukan kepada pemimpin dunia :

“tidak ada yang hilang dengan perdamaian. Semuanya mungkin hilang dengan perang. Semoga manusia sekali lagi mulai memahami satu sama lain dengan itikad baik dan dengan menghormati secara timbal balik, mereka akan menyadari bahwa hasil yang terhormat yang tidak disangka oleh negosiasi yang jujur dan efektif (Gallagher, 2017).

Kalimat Paus tersebut menggemakan gagasan yang secara jelas hadir dalam ajaran para paus sepanjang abad ke-20 yang menjadikan perdamaian sebagai prioritas yang jelas dan mutlak dan menentang segala bentuk konflik atau perang. Hal ini kemudian tertuang dalam Anjuran Apostolik *Evangelii Gaudium* yang memuat mengenai empat prinsip dalam memperjuangkan perdamaian, seperti *waktu lebih besar dari ruang, persatuan menang diatas konflik, realitas lebih penting daripada ide, keseluruhan lebih besar dari bagian, dan pribadi manusia lebih besar dari bangsa*. Tujuan yang ingin dicapai oleh Tahta Suci Vatikan ini juga ditemukan dalam Kompendium Ajaran Sosial Gereja No. 497 yang mengutuk akan segala kebiadaban perang. Hal ini semakin didukung oleh pernyataan dari Paus Leo XIII dan Paus Yohannes Paulus II dan VI, yang memandang bahwa perang tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang timbul diantara bangsa bangsa, karena menimbulkan konflik baru yang lebih rumit (Gallagher, 2017).

Adanya kepentingan untuk memperjuangkan perdamaian ini juga mendorong Tahta Suci Vatikan untuk bergabung dalam beberapa perjanjian internasional, seperti di bidang hak asasi manusia, Tahta Suci Vatikan adalah

pihak dalam Konvensi Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (1984), dan Konvensi Hak Anak (1989), Konvensi Berkaitan dengan Status Pengungsi (1951), Komite Eksekutif Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (1951), Konvensi Jenewa tentang Hukum Humaniter Internasional, dan anggota pendiri Badan Energi Atom Internasional (Wina, 1957), Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (1968) dan berbagai perjanjian internasional lainnya.

Hal ini merupakan peran dan kepentingan normatif dari Tahta Suci Vatikan untuk melindungi tatanan agama, perdamaian, dan moral di seluruh dunia. Tahta Suci Vatikan memandang dirinya sebagai suara moral yang berkontribusi pada diskusi bersama dengan penguasa lain yang membantu mereka dalam memajukan kebaikan semua orang. Hal ini terlihat dari banyaknya negara yang memiliki hubungan dengan Tahta Suci Vatikan, yakni sebanyak 182 negara dan beberapa organisasi internasional, yang menunjukkan bahwa Tahta Suci Vatikan memiliki 'kepentingan' yang tersebar di berbagai negara. Selain itu, tujuan ini tercermin dari beberapa ensiklik atau doktrin ajaran sosial yang dikeluarkan oleh Tahta Suci (John, 2013), seperti *Doctrine of Mercy* oleh Paus Fransiskus yang memuat mengenai ide untuk memerangi ketimpangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan perlakuan buruk terhadap orang-orang serta interpretasi mengenai belas kasihan yang melampaui identitas agama, *Dignitatis Humanae* atau Deklarasi Kebebasan Beragama yang menentang penggunaan kekerasan dan paksaan dalam tatanan sipil untuk semua orang dan lembaga dalam hal agama,

Gaudium et Spes mengenai tujuan dari Tahta Suci yang berkomitmen mengenai kemanusiaan dan kebaikan bersama dalam hubungan internasional, dan berbagai ajaran/doktrin sosial lainnya (Rivera A. F., 2016).

Dalam melaksanakan hubungan diplomatik, Tahta Suci Vatikan akan mengutus para nunsius atau biasa dikenal dengan **nunsiatur apostolik**. Nunsiatur Apostolik sendiri diartikan sebagai perwakilan pribadi Paus di bagian tertentu dari Gereja Katolik atau pada negara tertentu yang memiliki tingkat yang setara dengan kedutaan, namun tidak mengeluarkan visa dan juga tidak memiliki konsulat. Para nunsius ini memiliki dua tugas utama, yakni untuk mengawasi Gereja lokal dan untuk melayani sebagai penghubung antara Tahta Suci Vatikan dan negara tuan rumah. Dalam hubungan politik internal diatur dalam hukum Kanon 362 yang menyatakan bahwa Paus Roma memiliki hak independen dalam hal pengangkatan dan pemanggilan utusannya di berbagai negara atau otoritas publik dan secara yuridis eksternal, diplomasi Tahta Suci Vatikan diatur dalam Konvensi Wiina 1961 mengenai hubungan diplomatik (Troy, 2016). Paus sebagai pengambil kebijakan sebagian besar mengimplementasikannya melalui kata kata dan bertujuan untuk memengaruhi opini global dan mengubah perilaku orang, walaupun memang di beberapa kesempatan Tahta Suci Vatikan melakukan implementasi kebijakan langsung, seperti menengahi pemulihan hubungan bersejarah antara Kuba dan AS, mendukung proses perdamaian di Kolombia dan beberapa upaya diplomasi lainnya.

2.3 Peran Aktif Tahta Suci Vatikan Dalam Perdamaian

Perdamaian menjadi hal yang sangat krusial bagi Tahta Suci Vatikan, apalagi mengingat Tahta Suci Vatikan juga merupakan salah satu institusi agama, yang dimana tindakannya atas ajaran biblis atau secara teologis. Perdamaian merupakan salah satu visi sosial Gereja dan berakar dari dasar teologis, dimana Tahta Suci Vatikan melihat bahwa komitmen akan perdamaian didasari pada persekutuan dengan sang pencipta yang telah mewartakan tentang injil damai terlebih dahulu. Tahta Suci Vatikan mempersepsikan dirinya sebagai salah satu pengikut dan duta, berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada dunia dalam perdamaian (Peace Research Institute of The Canadian Council of Churches, 2003). Dalam hal ini, Tahta Suci Vatikan berfokus pada penyelesaian penyebab konflik dan membangun kondisi untuk perdamaian abadi yang mencakup empat komponen utama: (1) pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, (2) memajukan pembangunan manusia yang integral, (3) mendukung hukum internasional dan organisasi internasional, dan (4) membangun solidaritas antara masyarakat dan bangsa.

Adapun misi perdamaian ini terimplementasi melalui beberapa kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan di dunia internasional. Misalnya pada konflik antara Chili dan Argentina mengenai Selat Beagle. Kedua negara ini saling mengklaim selat tersebut sebagai miliknya dan menimbulkan ketegangan selama 100 tahun hingga menyebabkan perang lebih dari satu kali. Kedua negara telah melakukan pertemuan sebelumnya namun tetap tidak ada kemajuan dan bersiap untuk perang. Mendengar hal ini, Paus Yohannes Paulus II mengutus Kardinal

Samore untuk berbicara kepada pihak yang bertikai. Kardinal Samore yang bertindak sebagai mediator melakukan *shuttle diplomacy* terhadap Argentina dan Chile untuk mengakomodasi komunikasi pihak yang bertikai dan membangun kepercayaan, yang kemudian menghasilkan *Declaration of Peace and Friendship*. Adanya penandatanganan deklarasi ini menjadi puncak kesepakatan perdamaian antara Chili dan Argentina (Mathews, 2001).

Adanya keberhasilan kesepakatan perdamaian atas Chili dan Argentina sebelumnya menunjukkan adanya posisi Tahta Suci Vatikan dalam menyelesaikan konflik. Hal ini juga diamini oleh Volodymyr, Presiden Ukraina yang melihat Tahta Suci Vatikan sebagai tempat yang ideal untuk melaksanakan pertemuan dengan Putin terkait dengan ketegangan perbatasan Donbass yang terjadi antara kedua negara tersebut. Zelensky melihat bahwa Tahta Suci Vatikan merupakan otoritas moral dalam level global yang memainkan perannya sebagai mediator yang efektif karena sifatnya yang netral dan campur tangan tanpa adanya kepentingan politik-militer atau ekonomi dan selalu mengutamakan perdamaian. Hal ini bahkan diperkuat dengan pernyataannya dari Zelensky yang sering mengundang Tahta Suci Vatikan untuk menengahi konflik antarnegara (Mares, 2021). Dalam menanggapi masalah ini, Tahta Suci Vatikan menyerukan kepada keduanya dan juga kepada publik akan perdamaian bagi kedua negara untuk mengupayakan rekonsiliasi. Paus Fransiskus menekankan perlunya menghindari peningkatan ketegangan dan meningkatkan gerakan yang mempromosikan kepercayaan serta mendukung rekonsiliasi dan perdamaian sebagai hal yang sangat diinginkan dan dibutuhkan (VOA News, 2021). Zelensky juga turut

meminta bantuan kepada Paus Fransiskus agar turut membantu menyelesaikan ketegangan dengan Putin mengingat netralitas yang dimiliki oleh Tahta Suci Vatikan. Adapun permohonan ini ditanggapi dengan kesediaan Tahta Suci Vatikan untuk memediasi pertemuan Putin dan Zelensky (UNIAN, 2021).

Selain itu, misi perdamaian ini juga terlihat melalui *retreat diplomacy* yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ketika perang saudara di Sudan Selatan pada tahun 2019. Pertemuan itu dilakukan di Vatikan pada 11 April 2019 dan mendesak para pemimpin negara melakukan penyelesaian secara damai melalui dialog dan melaksanakan kesepakatan damai yang sebelumnya telah disetujui (Castelfranco, 2019). Pertemuan ini bukan pertemuan bilateral atau diplomatik biasa antara paus dan kepala negara, atau prakarsa ekumenis yang melibatkan perwakilan dari komunitas Kristen yang berbeda. Sebaliknya, pertemuan ini adalah *retreat spiritual* (Reuters, 2019). Paus Fransiskus melalui pidatonya mengajak para pemimpin Sudan Selatan bahwa perdamaian itu mungkin dan mendesak para pemimpin negara untuk mencari apa yang mempersatukan dan mengatasi apa yang memecah belah. Paus mengungkapkan harapan sepenuh hatinya bahwa permusuhan pada akhirnya akan berhenti, gencatan senjata akan dilakukan, perpecahan politik dan etnis akan diatasi, dan bahwa akan ada perdamaian abadi bagi semua warga negara (Vatican.va, 2019).

Adapun peran Tahta Suci Vatikan juga terlihat ketika terjadinya krisis di Venezuela di tahun 2014, dimana Venezuela mengalami penurunan ekonomi yang parah dan juga tingginya inflasi di negara tersebut, mencapai hingga 833,997% pada tahun 2018. Krisis yang terjadi juga disebabkan oleh anjloknya harga

minyak yang menjadi sektor pemasukan terbesar dari Venezuela sehingga terjadi pemerosotan ekonomi dan menyebabkan pertentangan dari demonstrasi dan oposisi. Adanya program sosial bagi masyarakat miskin menyebabkan pengeluaran meningkat, tetapi pemerintah justru mengizinkan mencetak uang lebih banyak sehingga inflasi tidak dapat dielakkan dan menyebabkan perlawanan dari masyarakat dan oposisi. Adanya perlawanan dari masyarakat yang dipimpin oleh oposisi direspon secara kekerasan oleh pemerintah, mulai dari gas air mata, peluru karet hingga penggunaan bom molotov dan pengerahan angkatan bersenjata (Altheide, 2018).

Adapun dalam permasalahan ini, Tahta Suci Vatikan menyatakan kesediaannya sebagai mediator antara pemerintah Venezuela dan oposisi untuk mencapai kesepakatan. Vatikan juga melakukan dialog bersama dengan UNASUR pada 2014 untuk mengakhiri protes, namun gagal menghasilkan kesepakatan nyata diantara kedua belah pihak. Namun, terlepas dari hal tersebut, posisi Tahta Suci Vatikan untuk menengahi konflik dan menciptakan perdamaian di Venezuela didukung oleh banyak pihak, mulai dari pihak oposisi pemerintah hingga masyarakat yang terlihat dari pengakuan Kardinal Parolin sebagai Nuntiatur di Venezuela menyatakan bahwa Tahta Suci Vatikan menerima banyak petisi untuk menengahi krisis Venezuela dan bersedia untuk mengambil peran yang disampaikan oleh Nuncio Apostolik di Venezuela kepada Wakil Presiden Venezuela (Smilde & Hernáiz, 2016). Tidak berhenti sampai disana, Paus juga menulis surat di tahun 2019 kepada Maduro untuk segera melakukan dialog untuk menyelesaikan krisis namun dengan cara-cara yang damai. Paus Fransiskus selalu

menekankan bahwasanya para pihak yang berkonflik bukan hanya melakukan dialog, namun menempatkan kebaikan bersama diatas kepentingan lain dan bekerja untuk persatuan dan kedamaian (Sky TG24 Italia, 2019). Di tahun 2016, Vatikan melakukan audensi dengan Nicolas Maduro dan mendorong Maduro untuk bertindak berani untuk memulai dialog yang tulus dan konstruktif, demi untuk meringankan penderitaan masyarakat. (O'Connell, 2016). Di tahun yang sama juga, pada akhir Oktober, Tahta Suci Vatikan melakukan pertemuan kembali dengan Maduro dan oposisi sebagai mediator, walau pada akhirnya kesepakatan yang telah diambil tidak ada tindakan nyatanya.

Sebenarnya masih banyak keterlibatan dari Tahta Suci Vatikan dalam memperjuangkan 'kepentingannya', seperti keterlibatan Paus Yohannes XXIII dalam solusi damai krisis misil Kuba, demokratisasi Polandia, upaya rekonsiliasi di negara demokrasi baru di Afrika Selatan, hingga konflik Suriah. Konflik Suriah menjadi salah satu *concern* dari Tahta Suci Vatikan saat ini, bahkan Paus Fransiskus menggambarkan Suriah sebagai kota yang sudah mati, dan semua orang sekarat. Paus Fransiskus melihat konflik Suriah sebagai ketakutan besar atau sebagai situasi yang tidak manusiawi, dimana banyak orang orang tak berdaya dan nyawa yang terancam. Paus Fransiskus menekankan kepada semua pihak yang terkait segera mengakhiri perang dan memulai perdamaian demi mengkhiri kesengsaraan terhadap masyarakat Suriah (Vatican News, 2020).

2.4. Perdamaian dan *Pacem In Terris*

Adanya konflik Suriah ini dipandang oleh Tahta Suci Vatikan sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat bertentangan dengan perdamaian dan hak asasi manusia. Tahta Suci Vatikan yang melihat konflik ini sangat bertentangan dengan tujuan universalnya, yakni kebaikan bersama, perdamaian hingga martabat manusia. Banyaknya korban yang berjatuh dan berbagai kekerasan yang terjadi mempengaruhi keinginan Tahta Suci Vatikan untuk turut serta menyelesaikannya demi mencapai perdamaian yang komprehensif. Adapun dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya kepentingan yang tercermin dari beberapa doktrin atau ajaran sosial Gereja, salah satunya *Pacem In Terris*.

Pacem In Terris atau biasa disebut dengan “Perdamaian di Dunia” merupakan ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Yohannes XIII di tahun 1963, bersamaan ketika dilaksanakannya Konsili Vatikan II. Ensiklik ini kemudian menjadi salah satu doktrin atau ajaran sosial Gereja Katolik yang digunakan oleh Tahta Suci Vatikan sebagai hierarki tertinggi dalam Gereja Katolik atau sebagai Tahta Suci Vatikan dalam hubungan internasional. *Pacem in Terris* sendiri lahir sebagai respon Tahta Suci Vatikan akan keadaan dunia saat itu yang dipenuhi ketakutan akibat dua kali perang dunia, sistem totalitarianisme, penderitaan manusia yang tidak terhitung, perang nuklir, hingga penganiayaan terhadap Gereja. Ditambah saat itu sedang terjadi perang dingin, adanya tembok Berlin yang membagi dua kota dalam dua ideologi yang berbeda, tingginya saling curiga dan tidak percaya, menelan korban banyak hingga krisis rudal rudal Kuba yang

dapat memancing perang terburuk dalam sejarah manusia. Adanya perlombaan senjata hingga terjadinya perang Vietnam menyebabkan Tahta Suci Vatikan melihat jalan untuk dunia yang damai, keadilan, dan kebebasan sepertinya tertutup (Paul, 2003)

Adanya perlombaan senjata dan ideologi politik saat itu menyebabkan kesengsaraan bagi manusia dan ketakutan akan masa depan. Perlombaan penyebaran pengaruh hingga senjata seperti Rusia yang menempatkan rudalnya di Kuba dan dibalas oleh AS. Keadaan dunia yang sedang tidak aman tersebut menandai kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan melihat pentingnya kebutuhan dunia akan perdamaian dan sebagai tujuan utama Tahta Suci Vatikan. Selain itu, merespon keadaan saat itu, Tahta Suci Vatikan melaksanakan Konsili Vatikan II untuk membahas tindakan yang harus diambil oleh Gereja, yang kemudian menandai pergantian Gereja dari promotor menjadi kekuatan pembebasan yang aktif. Melalui Paus Yohannes XXIII, Tahta Suci Vatikan melihat bahwa perdamaian bukanlah hal yang tidak mungkin. Ensiklik yang dikeluarkan berbicara mengenai hak milik mereka sebagai manusia dan menyoroti aspirasi bersama orang-orang di mana pun untuk hidup dalam keamanan, keadilan, dan harapan akan masa depan (Paul, 2003).

Paus melihat berbagai konflik yang terjadi sangat berbahaya bagi manusia, apalagi yang bereskalasi menjadi perang. Perang yang menggunakan senjata militer tidak membedakan sasarannya yang kemudian menyalur ke semua orang baik bersalah atau tidak. Perang juga menyebabkan ketidakadilan dan terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia. Terkhusus ketika terjadinya krisis

rudal Kuba, Tahta Suci Vatikan menjadi saluran belakang antara pemimpin AS dan Kuba pada saat itu, dimana Paus Yohannes XXIII menyerukan perdamaian melalui pesawat radionya dan mendesak dialog untuk mengakhiri konfrontasi berbahaya tersebut. Adapun tanggapan dari kedua negara tersebut ialah baik Kennedy dan Khrushchev sepakat untuk menyelesaikan krisis tersebut dan melaksanakan perundingan. Khrushchev mengimplementasikan apa yang dikatakan oleh Paus Yohannes XXIII, sebagai seseorang yang dicintai oleh pemimpin komunis, yang direkomendasikan dalam "*Pacem In Terris*", yang menyatakan bahwa "perdamaian sejati dan abadi diantara bangsa bangsa tidak dapat didasari pada kepemilikan pasokan persenjataan yang setara, namun perdamaian bisa terjadi karena adanya saling percaya" yang dikirim oleh Paus Yohannes XXIII dan juga salinan pra-publikasi *Pacem In Terris* dalam bahasa Rusia (Douglass, 2013). Adapun Khrushchev menyerukan negosiasi untuk menghentikan ketegangan dan meminta persetujuan Kennedy serta melakukan pembongkaran senjata dan mengembalikannya ke Uni Soviet tiga hari setelah seruan dari Paus Yohannes XXIII (Lindsay, 2012).

Adapun *Pacem In Terris* ini terbagi dalam empat bagian, yakni yang mengatur mengenai hubungan antara individu manusia, hubungan antara masyarakat/individu dengan otoritas politik, hubungan antar negara, dan hubungan antara individu dan negara dalam komunitas atau biasa disebut dengan kemanusiaan, yang dimana apabila ditarik, bertujuan pada pencapaian perdamaian. Dalam melihat perdamaian itu sendiri, Paus Yohannes XXIII mengidentifikasi kondisi penting dalam mewujudkan perdamaian, yakni kebenaran, keadilan, cinta

kasih, dan kebebasan. (Paul, 2003). Kebenaran akan terwujud apabila setiap individu mengakui bukan hanya hak pribadinya, namun juga tugasnya kepada orang lain. Keadilan akan terwujud apabila setiap orang menghormati hak dari orang lain dan melaksanakan tugasnya kepada orang lain, dan cinta kasih akan terwujud apabila masyarakat merasakan kebutuhan orang lain sebagai milik mereka dan berbagi apa yang mereka miliki dengan orang lain, terutama mengenai nilai-nilai yang dimiliki. Kebebasan akan membangun perdamaian dan akan berkembang apabila orang-orang bertindak sesuai dengan akal dan memikul tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri (Paul, 2003)

Pada akhirnya, *Pacem in Terris* yang dikeluarkan oleh Paus Yohannes XXIII menjadi salah satu ajaran agama Katolik dan mempengaruhi kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan dalam mengejar kepentingannya, yakni perdamaian. Namun, perdamaian ini merupakan hal yang kompleks, yang didasarkan pada penghormatan akan hak asasi manusia serta penyelesaian konflik dengan cara-cara yang damai.

2.5 Tahta Suci Vatikan dan Konflik Suriah

Aktivitas Tahta Suci Vatikan di arena internasional selalu mengejar hal yang berbaur moral dan etis demi memperjuangkan martabat manusia. Tahta Suci Vatikan dan Paus bekerja dalam logika yang berbeda dari kepentingan yang lain dan memiliki tujuan yang berbeda pula. Hal ini secara natural didorong oleh unsur kekristenan dan mandat dari Gereja. Paus dan pemerintahannya bertindak berdasarkan mandat yang diklaim yang diutus oleh Kristus, salah satunya yang

mencakup mengenai manusia, baik hak dan kewajiban, dan hubungan manusia dengan negara dan keadaan dunia yang damai, terlepas dari apapun kepercayaannya. Perdamaian merupakan salah satu tema terbesar dalam kekristenan yang memandu kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan (Matlary, 2007). Untuk mencapai perdamaian itu sendiri, Tahta Suci Vatikan sangat merekomendasikan cara cara yang damai pula, bukan melawan kekerasan dengan kekerasan. Oleh karena itu, Tahta Suci Vatikan dalam kegiatan internasionalnya akan selalu menggunakan cara yang damai seperti memberikan surat kepada pihak terkait, melakukan diplomasi, atau sebagai mediator, hingga membawakannya dalam homili atau acara ibadahnya.

Fokus dari Tahta Suci Vatikan sendiri terhadap Timur Tengah secara eksplisit dimulai pada masa Paus Yohannes Paulus II, terlepas dari faktor sejarah atau peradaban kekristenan yang sangat erat di Timur Tengah. Hal ini bahkan tergambar dengan jelas dengan pernyataannya pada GA tahun 1979.

“Adalah harapan saya untuk menemukan solusi dalam krisis Timur Tengah agar semakin dekat. Sebuah upaya atau langkah konkret yang akan dilakukan tidak akan ada nilainya jika tidak benar benar mewakili semua pihak. Terutama perdamaian umum di wilayah tersebut harus didasarkan pada pengakuan yang adil atas hak semua orang, termasuk kemerdekaan dan integritas Lebanon, penyelesaian yang adil akan Palestina hingga Jerusalem” (Stake, 2006)

Dari pernyataan tersebut Paus berbicara mengenai ‘krisis Timur Tengah’ untuk menunjukkan pluralitas isu yang dihadapi oleh kawasan tersebut. Kalimat yang mengacu pada “hak semua pihak”, “penyelesaian Palestina’, kemerdekaan Lebanon, hingga “sifat khusus” dari Jerusalem sebagai penghormatan kepada

Yudaisme, Kristen, dan Islam. Adapun fokus Tahta Suci Vatikan ini didasarkan pada krisis yang terjadi pada saat itu yang menyebabkan perdamaian menjadi sesuatu yang sulit dan menyebabkan ketiadaan terhadap penghormatan martabat manusia. Selain itu, Tahta Suci Vatikan juga memiliki kepentingan gerejawi yang disorot di Timur Tengah (Stake, 2006), yakni (1) perlindungan terhadap kesejahteraan minoritas Kristen, (2) promosi akan hidup berdampingan secara damai dan (3) memenangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia Yahudi, Kristen, dan Muslim.

Tahta Suci Vatikan kemudian melakukan berbagai pendekatan dan penyelesaian secara damai, salah satunya dengan menginisiasi *Fundamental Agreement* yang memuat mengenai perjanjian antara Tahta Suci dengan Israel, agar Israel tetap mengakui hak asasi manusia di Palestina, kebebasan beragama dan sebagai suara moral dari Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci memandang bahwa perang yang terjadi di Teluk Gulf akan mengakibatkan konsekuensi yang tragis, bukan hanya di Timur Tengah, namun juga di dunia, dan percaya bahwa perang hanya akan berujung pada ketidakadilan yang lebih besar. Sama halnya dengan perang sipil di Lebanon, yang menyebabkan umat Kristen di Lebanon terancam, Tahta Suci Vatikan berupaya bukan hanya menyelamatkan umat Kristen saja, namun mengupayakan penyelesaian akan Lebanon secara keseluruhan, terlepas apa saja kepercayaannya dengan mengirimkan utusan atau Nunsiatour untuk memobilisasi segala persiapan untuk sinode (semacam dialog antar pihak untuk memutuskan penyelesaian) yang menghasilkan *Post-Synodal Apostolic Exhortation : A New Hope For Lebanon*.

Selain itu, Tahta Suci Vatikan juga berfokus pada Suriah, terutama mengenai hidup berdampingan secara damai dan termasuk penyelesaian akan konflik yang terjadi. Jauh sebelum pecahnya konflik Suriah, Tahta Suci sudah menaruh perhatian besar kepada Suriah, khususnya pada saat itu untuk melindungi umat Kristiani sebagai minoritas. Pola yang dilakukan tetap sama, yakni mediasi, dialog, dan diplomasi. Pecahnya konflik Suriah di tahun 2011 juga menjadi sebuah *highlight* bagi Tahta Suci. Terlepas dari perlindungan terhadap umat Katolik di Suriah, sama seperti kasus di Lebanon, Tahta Suci Vatikan mengusung perdamaian yang berdasar pada penghormatan terhadap martabat manusia tanpa pandang bulu. Tahta Suci memandang konflik Suriah sebagai salah satu bencana kemanusiaan paling serius di zaman ini (Glatz, 2021). Tahta Suci melalui Paus Fransiskus juga menyayangkan penderitaan semua orang yang telah terbunuh, terluka, terpaksa melarikan diri atau menghilang, serta menyayangkan bagaimana seluruh penduduk terus menghadapi kehancuran, kekerasan dan penderitaan tidak manusiawi.

Konflik Suriah merupakan salah satu efek domino dari Arab Spring yang terjadi di Timur Tengah pada tahun 2011 lalu. Arab Spring ini merupakan bentuk protes masyarakat sipil terhadap ketidakpuasan terhadap pemimpin saat itu, selain sistem pemerintahan yang otoriter, ketidakpuasan ini juga dihadapkan pada banyaknya masalah internal, seperti tingginya tingkat korupsi, menurunnya tingkat ekonomi, pemerintahan yang represif, pengekangan kebebasan individu dan berbagai kemerosotan lainnya (Tamburaka, 2011). Dengan kondisi negara yang tidak stabil tersebut, masyarakat menuntut adanya perubahan, terutama

mengakhiri pemerintahan yang otoriter menjadi lebih demokratis, walaupun pada akhirnya berubah menjadi perang proxy yang melibatkan berbagai kepentingan aktor lainnya.

Terjadinya konflik merupakan salah satu hal yang merusak perdamaian karena adanya konflik mendorong terjadinya kekerasan. Kekerasan sendiri dibagi menjadi 3, yakni kekerasan struktural, kultural dan langsung (Perwita & Sabban, 2015). Kekerasan struktural merupakan kekerasan yang ditandai dengan kekerasan non verbal dan mencegah masyarakat atau individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kelaparan, kemiskinan, penindasan. Sedangkan kekerasan langsung merupakan tindakan kekerasan yang terlihat secara langsung dan menyebabkan luka fisik serta menimbulkan penderitaan, misalnya seperti perang, serta kekerasan kultural merupakan kekerasan yang diproduksi dari kebencian, ketakutan aspek aspek budaya hingga ideologi yang menjustifikasi terjadinya suatu kekerasan langsung (Perwita & Sabban, 2015). Kekerasan kultural ini merupakan kekerasan yang tidak terlihat atau tidak langsung dan melibatkan pengaruh dari budaya, agama atau perbedaan ideologi yang mengarah pada ketidaksetaraan akses bagi individu untuk mencapai potensinya.

Dalam konflik Suriah ini juga menyebabkan terjadinya banyak kekerasan, mulai dari kekerasan struktural hingga langsung. Secara struktural, adanya konflik ini menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan, tidak adanya akses terhadap makanan, obat atau kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan. Salah satunya di wilayah Ghouta Timur yang sangat terbatas terhadap akses ke perawatan yang sangat dibatasi untuk sekitar 350.000 warga sipil, dan bahkan hanya memiliki satu

dokter per 3.600 orang. Layanan sanitasi dasar pun sangat langka karena pompa dan pipa yang rusak akibat perang yang meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Kurangnya akses keberlanjutan ke perawatan kesehatan, pendidikan, perumahan dan makanan telah memperburuk dampak dari konflik dan mendorong jutaan orang ke dalam pengangguran dan kemiskinan. Hal ini terlihat dari sebanyak 60-65% dari jumlah populasi di Suriah mengalami *extreme poverty* (UN WFP, 2021). Selain itu, Suriah juga mengalami tingkat pengangguran yang tinggi yakni mencapai 9,03% (Statista, 2020). Belum lagi ekonomi yang runtuh sangat berdampak pada kelangsungan masyarakat Suriah dimana sejak pecahnya konflik ini di tahun 2011, ekonomi Suriah telah menurun lebih dari 70% (World Bank, 2021) dengan tingkat inflasi yang tinggi pula yakni mencapai hingga 52,43% di tahun 2020 dengan tingkat paling tinggi pada tahun 2013 yakni sebesar 121,29% (Shaw, 2021). Sangat terlihat dengan jelas kekerasan struktural seperti kemiskinan, pengangguran, akses terhadap pendidikan, kesehatan hingga makanan yang sangat terbatas yang diakibatkan oleh konflik Suriah mencegah masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kekerasan langsung paling sering ditemui dalam konflik ini, mulai dari penggunaan senjata hingga penyiksaan secara langsung. Sejak awal demonstrasi yang dimulai damai, pihak pemerintah merespon demonstrasi tersebut dengan menggunakan senjata seperti penggunaan tank dan kapal laut. Penggunaan senjata kimia juga masuk dalam konflik ini, dimana sejak September 2013, terdapat sebanyak 106 serangan dengan menggunakan senjata kimia di Suriah yang baik dilakukan oleh pihak pemerintah atau oposisi dengan persebaran lokasi

penggunaan senjata kimia ini terdapat di Idlib, Hama, Aleppo, hingga Damaskus (BBC News, 2018). Dari serangan-serangan tersebut, klorin merupakan senjata kimia yang paling banyak digunakan yang memakan korban hingga 260.000 jiwa (Adirini Pujayanti, 2016). Bukan hanya itu, penggunaan bom cluster yang dijatuhkan ke kawasan pengungsi dan oposisi di Aleppo oleh Rusia menewaskan hingga 50 orang dan lainnya luka luka. Dalam konflik ini, pihak dari Suriah sendiri menggunakan sebanyak 249 bom cluster dengan 9 jenis bahan peledak yang mengakibatkan 1.584 orang meninggal, dimana hampir 97% dari jumlah korban merupakan warga sipil (Suprobo, Supriyadhie, & Winoto, 2016). Selain itu juga, perempuan menjadi kelompok paling rentan ketika terjadi konflik. Diperkirakan bahkan terdapat hingga 6.000 kasus pemerkosaan yang terjadi selama konflik yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau pemberontak di pos pemeriksaan dan di fasilitas penahanan. Hal ini menunjukkan bahkan pasukan keamanan pun turut terlibat dalam kekerasan seksual pada beberapa kesempatan (Jackson, 2013). Selain itu, wanita juga dieksploitasi secara seksual demi bantuan kemanusiaan. Artinya, wanita wanita di Suriah akan mendapat bantuan makanan dan minuman setelah diperkosa oleh beberapa oknum yang mengaku sebagai lembaga bantuan (BBC News, 2018). Dikarenakan penyaluran bantuan ini tidak bisa dilakukan oleh staf asing, hanya boleh dilakukan oleh pihak setempat dan juga beberapa pihak ketiga sehingga dapat dilihat bahwa yang melakukan eksploitasi seksual ini merupakan pihak setempat.

Secara kultural, kekerasan yang terjadi selama konflik Suriah terjadi dapat dilihat lebih jelas dari sudut pandang perempuan. Sejak terjadinya konflik,

tantangan dan penderitaan perempuan Suriah semakin jelas. Perempuan selain menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga, perempuan juga kehilangan keamanan, rumah, mata pencaharian, pelecehan seksual, anggota keluarga hingga status sosial dan mengalami diskriminasi dalam setiap aspek kehidupannya, yang tidak jarang menjadi pembenaran atas kekerasan langsung yang dilakukan oleh oknum tertentu. Undang-undang yang diskriminatif, budaya patriarki yang mengakar hingga politik eksklusivitas rezim yang berlangsung lama menolak hak hak mendasar wanita sebagai warga negara (WILPF, 2018). Selain itu, kekerasan kultural dalam bentuk ideologi dan agama semakin melegitimasi kekerasan yang terjadi, dimana terjadi pertarungan akan “*chosen*” dan “*unchosen*”. Pertarungan yang terjadi ini semakin mendukung perpecahan antara minoritas Alawi dan mayoritas Sunni. Adanya legitimasi dari pemerintah untuk menggunakan kekerasan dalam melawan ekstrimisme berasal dari penyebaran narasi bahwa semua pemberontak memiliki motif tersembunyi yang sama yakni untuk membangun kekhilafan Islam yang intoleran menyebabkan pasukan pemerintah menggunakan senjata militer hingga pemboman tempat tempat pemukiman dan pembantaian. Selain itu juga, terdapat budaya atau kebiasaan dimana adanya normalisasi yang memandang bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar dan merupakan bagian dari kehidupan sehari hari. Adanya penindasan yang terjadi di Suriah kemudian menjadikan penggunaan kekerasan hingga penangkapan sebagai hal yang wajar (Anand, 2020).

Terjadinya berbagai kekerasan di konflik Suriah jelas sangat bertentangan dengan perdamaian yang selama ini diupayakan oleh Tahta Suci Vatikan, karena

kekerasan tersebut menyebabkan hak individu terabaikan dan dipandang sebagai hal yang perlu untuk diperjuangkan. Perjuangan akan perdamaian di Suriah bukan hanya dipandang sebagai ketiadaan perang, namun juga sebuah konsep yang lebih kompleks. Pandangan ini memiliki kesamaan dengan Galtung, yang melihat perdamaian sebagai perdamaian negatif dan positif. Adapun pandangan Tahta Suci Vatikan ini memiliki kesamaan dengan perdamaian positif dari Galtung, yang memandang bahwa perdamaian merupakan distribusi kebutuhan yang merata, penghargaan terhadap hak asasi manusia, investigasi yang jujur akan kejahatan yang terjadi selama konflik, serta berbagai masalah modern lainnya.

Perjuangan akan perdamaian di Suriah jelas bukan hal yang mudah, mengingat kompleksnya masalah dan aktor yang terlibat. Namun, sesuai dengan prinsip Tahta Suci Vatikan yang selalu mengedepankan cara-cara damai, Tahta Suci Vatikan mengupayakan beberapa tindakan sebagai bentuk keterlibatan dalam mencapai perdamaian di Suriah. Hal ini antara lain turut serta berpartisipasi dalam konferensi “ *Supporting Syria and the Region*” yang bertujuan untuk merespon krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah di tahun 2016 (The Holy See Press Office, 2016). Di tahun berikutnya, Tahta Suci Vatikan juga turut dalam konferensi tersebut melalui Paus Fransiskus menekankan kepada negara negara dan organisasi internasional untuk bekerjasama dan negosiasi secara serius untuk mengakhiri konflik yang menyebabkan bencana kemanusiaan. Paus Fransiskus mengajak semua pihak yang berkonflik untuk mengakhiri kekerasan dan menumbuhkan solidaritas yang menjadi dasar untuk perdamaian, yang kemudian

membangkitkan keinginan untuk berdialog dan kerja sama yang menemukan instrumen penting dalam diplomasi (The Holy See Press Office, 2017)

Bukan hanya melakukan pendekatan dengan aktor internasional, Tahta Suci Vatikan juga berupaya dengan mempengaruhi publik dengan melakukan berbagai seruan perdamaian untuk masyarakat di Suriah dan di seluruh dunia. Hal ini misalnya dilakukan oleh Paus Fransiskus dengan mengajak ribuan orang di Lapangan Santo Petrus untuk menjaga perdamaian di Suriah yang belum pernah terjadi sebelumnya (Viette, 2013). Hal ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar yang pernah terjadi di Barat untuk menentang usulan aksi militer pimpinan AS yang melakukan intervensi di Suriah. Tahta Suci Vatikan juga hadir secara langsung dalam G20 di Rusia dan mendesak mereka untuk menyudahi solusi militer di Suriah dan mencari penyelesaian yang dinegosiasikan. Paus juga gencar untuk menekankan perdamaian di Suriah ketika dilaksanakannya pertemuan atau sidang PBB melalui pidato yang disampaikan (Newman, 2019)

Selain melakukan tindakan dalam organisasi internasional, Tahta Suci Vatikan juga mengupayakan perdamaian di Suriah dengan melakukan dialog secara tidak langsung yakni melalui surat. Dalam hal ini, Tahta Suci Vatikan mengirimkan surat kepada Assad untuk segera mengakhiri tragedi kemanusiaan yang terjadi dan melindungi masyarakat terutama mereka yang lemah dan menghormati hukum humaniter internasional (AsiaNews, 2019). Tahta Suci Vatikan sangat menyayangkan meletusnya perang tersebut dan menyarankan untuk melaksanakan rekonsiliasi, diplomasi atau dialog untuk menghentikan segala kekerasan yang terjadi. Selain itu, Tahta Suci Vatikan selain aktif dalam

berbagai forum internasional melalui pidatonya, sama seperti ungkapan Nunsius untuk Suriah yang menyatakan bahwa perdamaian tidak akan datang ke Suriah tanpa rekonstruksi dan juga pemulihan ekonomi dengan memberikan beberapa bantuan ekonomi dan sosial untuk Suriah (Gagliarducci, 2020). Tindakan eukumene dan teologis juga turut dilakukan oleh Tahta Suci Vatikan dengan mengajak orang-orang Kristen untuk berdoa, melakukan sinode antar uskup untuk menyerukan diplomasi, sebagai salah satu komitmen Gereja untuk menjaga dunia, terutama kepada orang-orang miskin dan pada perdamaian hingga perlindungan manusia. Diplomasi juga dilakukan oleh Tahta Suci Vatikan terhadap Assad dan juga Putin, mengingat Putin merupakan salah satu aliansi Assad yang melindungi Assad selama ini. Tahta Suci Vatikan melakukan pendekatan dengan Putin untuk membantu terjadinya diplomasi dan membantu mendorong perdamaian di Suriah (Souza, 2017)

Keterlibatan dari Tahta Suci Vatikan dalam konflik ini bukan hanya sebatas melakukan seruan-seruan perdamaian, namun juga turut membantu masyarakat korban perang dengan menerima beberapa pengungsi, sebagai bentuk mencintai dan penghormatan terhadap tingginya nilai atau martabat seorang manusia sebagai ciptaan Tuhan. Namun, dari berbagai keterlibatan Tahta Suci Vatikan di atas, dapat terlihat bagaimana semua tindakannya sejalan dengan prinsip damai yang selalu dijunjung, walaupun memang posisi Tahta Suci Vatikan dalam panggung perpolitikan internasional tidak sekuat negara-negara besar dan kuat lainnya, namun kegigihan dan tujuan Tahta Suci Vatikan demi mencapai perdamaian yang kompleks di Suriah tetap diperjuangkan bukan karena alasan

kepentingan nasional ala material, namun lebih ke arah kepentingan akan nilai norma perdamaian dan hak asasi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang dianut serta dipercayai.

2.6 Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan tidak dapat dilepaskan dari nilai nilai kekristenan yang dianut dan berbagai pandangan yang telah mengakar pada setiap kepemimpinan Tahta Suci Vatikan. Nilai nilai kekristenan yang mengusung perdamaian, hak asasi manusia, solidaritas dan penentangan akan perang bukan hanya seruan semata. Nilai nilai kekristenan ini kemudian sering diterjemahkan menjadi sebuah ensiklik atau dapat dipersepsikan sebagai sebuah dogma atau norma yang menunjukkan apa saja kepentingan dari Tahta Suci Vatikan di dunia ini, salah satunya *Pacem in Terris* atau pentingnya perdamaian di muka bumi. Tahta Suci Vatikan yang memandang dirinya sebagai sebuah agen moral dan memiliki misi kemanusiaan global yang percaya bahwa Tahta Suci Vatikan mampu memberikan kontribusinya dalam menjadikan masyarakat dunia yang damai dan sejahtera. Hal ini juga selain didasari oleh dogma yang dimiliki oleh Tahta Suci Vatikan, dasar dasar biblis dan kepercayaan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang harus dihargai dan dicintai mendorong Tahta Suci Vatikan untuk turut serta dalam penyelesaian berbagai konflik internasional.

Berbagai kasus telah dipaparkan sebelumnya, mulai dari krisis misil Kuba, kasus selat Beagle, perbatasan di Ukraina hingga krisis di Sudan Selatan

menunjukkan berbagai perjuangan dari Tahta Suci Vatikan untuk mencapai perdamaian di negara negara tersebut. Krisis dan konflik yang menyebabkan pengabaian terhadap martabat manusia mendorong Tahta Suci Vatikan untuk membantu mereka melalui cara cara yang damai pula. Tidak terkecuali konflik Suriah yang hingga saat ini masih menjadi perhatian, Tahta Suci Vatikan telah melakukan berbagai upaya bagaimana kiranya perdamaian di Suriah dapat tercapai walau memang tidak mudah, mengingat kekuasaan yang dimiliki Tahta Suci Vatikan dalam panggung politik internasional tidak sekuat negara lainnya. Namun, adanya keterlibatan ini setidaknya menunjukkan betapa besarnya kepentingan Tahta Suci Vatikan di Suriah yang hendak dicapai demi sebuah perdamaian yang nilai dan norma dipercayai oleh Tahta Suci Vatikan.